LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2026

JUDUL

"Sinergi Magang MBKM Untuk Update Data PBB-P2"

Fokus Strategis

Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Kewilayahan

Tim Ahli

Dr. I Made Endra Kartika Yudha, SE., M.Sc

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-1. Latar Belakang

Permasalahan mendasar PBB-P2 di Kabupaten Klungkung adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara data objek pajak yang tercatat dalam SISMIOP/SPPT dengan kondisi fisik riil di lapangan. Ribuan bidang yang semula tercatat sebagai tanah kosong telah berubah menjadi rumah, ruko, atau bangunan produktif lainnya, namun perubahan tersebut belum terrefleksikan dalam database perpajakan. Akibatnya, penerimaan PBB-P2 Kabupaten Klungkung tidak mencerminkan potensi fiskalnya yang sesungguhnya. Inovasi ini mengusulkan kerjasama sistemik dan terstruktur antara Pemerintah Kabupaten Klungkung (melalui BAPENDA) dengan perguruan tinggi mitra melalui mekanisme MBKM — sebuah program nasional yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan pengakuan 20 SKS. Dengan demikian, pembaruan data masif dapat dilaksanakan setiap tahun tanpa membebani APBD secara signifikan

Kegiatan pendataan dan survei merupakan kegiatan yang mahal dan menyerap anggaran yang besar. Untuk itu diperlukan mekanisme yang lebih murah namun presisi dengan SDM yang memiliki kemampuan yang baik dibidang IT. Untuk itu proses ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk memberikan dampak dalam pengambilan kebijakan dan penetapan update data PBB.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 membuka peluang luar biasa bagi pemerintah daerah. Dalam skema ini, mahasiswa dapat mengambil kegiatan di luar kampus selama 1–2 semester dengan pengakuan hingga 40

SKS, termasuk kegiatan yang dilaksanakan bersama mitra pemerintah daerah. Dengan ribuan mahasiswa aktif dari Universitas Udayana, UNDIKSHA, Politeknik Negeri Bali, dan perguruan tinggi lain di Bali, terdapat sumber daya manusia muda, terdidik, dan terlatih yang dapat dikerahkan secara terorganisir untuk melaksanakan survei lapangan PBB-P2 — dengan manfaat akademik yang nyata bagi mahasiswa itu sendiri.

I. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Membangun sistem pemutakhiran data PBB-P2 yang berkelanjutan, akurat, dan berbiaya efisien melalui integrasi program MBKM sebagai mekanisme survei lapangan tahunan yang terstruktur dan diakui secara akademik, demi meningkatkan keadilan fiskal dan optimalisasi penerimaan asli daerah Kabupaten Klungkung.

2. Tujuan

Secara umum, program ini bertujuan untuk:

1. Memutakhirkan seluruh data objek PBB-P2 di Kabupaten Klungkung secara sistematis dan menyeluruh dalam jangka waktu 3 tahun, dengan fokus utama pada identifikasi perubahan dari tanah kosong menjadi bangunan.

2. Meningkatkan penerimaan PBB-P2 secara signifikan dan terukur melalui pembaruan NJOP dan data fisik bangunan yang sesuai dengan kondisi riil.

3. Membangun ekosistem kerjasama jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kebutuhan daerah

2.1 Tujuan Khusus

• Mengidentifikasi objek pajak yang mengalami perubahan fisik (tanah kosong → bangunan) dalam 3 tahun pelaksanaan program.

• Meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan pada objek-objek yang teridentifikasi berubah sesuai standar penilaian berlaku.

• Menaikkan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Klungkung minimal 25% pada akhir tahun ketiga pelaksanaan.

• Mewujudkan basis data PBB-P2 yang memiliki cakupan kemutakhiran di atas 90% pada tahun 2028. Bidang Akademik & Pengembangan SDM

• Memberikan pengalaman praktik nyata kepada mahasiswa dalam bidang perpajakan daerah, pemetaan, dan administrasi publik.

• Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lapangan yang diakui melalui rekam jejak MBKM bersama pemerintah daerah.

• Mendorong penelitian applied di bidang fiskal daerah, GIS, dan teknologi survei berbasis data riil Kabupaten Klungkung. Bidang Kelembagaan & Teknologi

• Membangun platform digital terintegrasi antara aplikasi survei mobile, SISMIOP, dan dashboard monitoring pemutakhiran data.

• Menstandarisasi prosedur survei objek PBB-P2 yang dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

• Menciptakan model kerjasama pemerintah daerah-perguruan tinggi yang dapat

dijadikan contoh nasional dalam pengelolaan pajak berbasis data.

II. Ide dan Gagasan

1. Ide Ggasan Utama

Gagasan inti adalah mengintegrasikan aktor untuk update data dalam satu payung ekosistem yang legal dan saling menguntungkan. Pemerintah akan memberikan akses dan pengalaman bekerja untuk mahasiwa. Perguruan tinggi akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan MBKM dan pengalaman terhadap dunia kerja serta mempraktekan ilmu pengetahuan. Mahasiswa akan mendapatkan manfaat terhadap pengalaman kerja dan situasi riil di Lapangan.

2. Mekanisme Survei

Survei pemutakhiran data dilaksanakan dengan pendekatan sistematis berbasis wilayah administratif:

a. Seleksi Zona Prioritas

Tidak semua kelurahan/desa disurvei sekaligus. Zona prioritas ditentukan berdasarkan tiga kriteria: (1) tingginya persentase objek dengan kode 'tanah kosong' dalam data SPPT eksisting, (2) tingginya pertumbuhan IMB/PBG yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, dan (3) lonjakan harga tanah berdasarkan NJOP zona nilai tanah terbaru.

b. Prosedur Survei Door-to-Door

Setiap tim mahasiswa (3–4 orang) bertugas di 1 dusun/banjar selama 2 minggu, dengan prosedur:

• Membawa daftar SPPT yang akan diverifikasi (objek berlabel 'tanah kosong' atau tanpa data bangunan).
• Mendatangi langsung setiap bidang objek pajak; merekam foto fisik dengan GPS tagging.
• Mengukur luas bangunan yang berdiri menggunakan laser distance meter atau metode manual terstandar.
• Mengklasifikasikan tipe bangunan (rumah sederhana, menengah, mewah, vila, ruko, gudang) sesuai panduan BAPENDA.
• Meminta konfirmasi dan tanda tangan wajib pajak atas data yang dikumpulkan.
• Menginput semua data lapangan ke dalam aplikasi mobile survei secara real-time.

c. Aplikasi Mobile Survei PBB-P2

Aplikasi mobile khusus dikembangkan oleh tim mahasiswa Informatika bermitra dengan Diskominfo Klungkung, dengan fitur-fitur:

• Login berbasis NIM/NIK dengan autentikasi dua faktor untuk keamanan data.
• Form input data objek: NOP, luas tanah, luas bangunan, tipe konstruksi, tahun bangunan, foto (minimal 3 sudut).
• GPS auto-fill untuk koordinat objek pajak; validasi batas bidang dengan overlay peta PTSL.
• Status submission: Draft → Submitted → Reviewed → Approved oleh supervisor BAPENDA.
• Dashboard supervisor real-time: peta sebaran progres survei per banjar dan per mahasiswa.
• Sinkronisasi otomatis dengan SISMIOP setelah data diverifikasi dan disetujui BAPENDA.

3. Sistem penjaminan Kualitas

Validasi Lapangan

• Setiap data yang diinput mahasiswa diverifikasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara sampling minimal 20%.
• BAPENDA menugaskan 1 petugas koordinator per kecamatan sebagai Quality Controller yang memastikan konsistensi penilaian antar tim.

Validasi Lintas Data

• Cross-check otomatis antara data survei mahasiswa dengan data IMB/PBG dari Dinas PUPR.
• Verifikasi terhadap data PTSL BPN untuk

memastikan batas bidang yang benar.
• Rekonsiliasi dengan data PLN dan PDAM sebagai proxy keberadaan bangunan berpenghuni.

III. Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu memperkuat landasan hukum program ini melalui:

• Peraturan Bupati tentang Kerjasama Survei Data PBB-P2 dengan Perguruan Tinggi, yang mengatur ruang lingkup, kewajiban para pihak, perlindungan data, dan mekanisme pengakuan SKS.

• Nota Kesepahaman (MoU) jangka panjang (5 tahun) antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan masing-masing perguruan tinggi mitra, yang diperbaharui secara berkala.

• Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Survei PBB-P2 untuk memberikan dasar hukum pembentukan tim lintas OPD.

b. Integrasi dengan Sistem Perpajakan Nasional Rekomendasi ini juga membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal:

• Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klungkung untuk penyelarasan data penerimaan dan pencegahan duplikasi pemajakan.

• Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) untuk memastikan objek PBB-P2 milik pemerintah daerah terdokumentasi dengan benar.

• Pelaporan kepada Dirjen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DJPRD) Kemendagri sebagai bagian dari peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Semarapura, 03 Juni 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-